



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RAPAT KERJA KOMISI VI DPRRI DENGAN MENTERI BUMNRI

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 14 Juni 2021
Waktu : 15.00 s.d. 17.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPRRI Gedung Nusantara I Lt.1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPRRI)
Acara : Pengambilan Keputusan terhadap Usulan Penerimaan Penyertaan Modal Negara Tahun 2022
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPRRI
Hadir : A. Anggota DPRRI:
51 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
11 dari 12 orang Anggota
1. Aria Bima
2. Adisatrya Surya Sulisto
3. Darmadi Durianto
4. Rieke Diah Pitaloka
5. S.T Ananta Wahana, S.H
6. Sonny T. Danaparamita
7. I Nyoman Parta, S.H.
8. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc
10. Sondang Tiar Debora Tampubolon
11. dr. H. Mufti A.N. Anam
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
8 dari 8 orang Anggota
1. I Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P
2. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
3. Drs. Mukhtarudin
4. Lamhot Sinaga
5. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
6. Doni Akbar, S.E.
7. Trifena M. Tinal, B.Sc.
8. Nusron Wahid

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
7 dari 7 orang Anggota
 1. Mohamad Hekal, M.B.A.
 2. Andre Rosiade
 3. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
 4. Khilmi
 5. Ir. H. La Tinro La Tunrung
 6. M. Husein Fadlulloh, S.Bus., M.M.
M.B.A.
 7. Hendrik Lewerissa, S.H., L.L.M

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Martin Manurung, S.E., M.A.
 2. Nyat Kadir
 3. H. Subardi, S.H., M.H.
 4. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
 5. Muhammad Rapsel Ali

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)
6 dari 6 orang Anggota
 1. Faisol Riza, S.S.
 2. Ir. H. M. Nasim Khan
 3. Tommy Kurniawan
 4. Marwan Ja'far
 5. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos.,
M.Si.
 6. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
 2. Muhammad Dhevy Bijak
 3. Hj. Melani Leimena Suharli
 4. Putu Supadma Rudana

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)
2 dari 4 orang Anggota
 1. Hj. Nevi Zuairina
 2. Rafli
 3. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
5 dari 5 orang Anggota

1. Abdul Hakim Bafagih
2. Nasril Bahar, S.E.
3. Primus Yustisio, S.E.
4. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.
5. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
 2. Elly Rachmat Yasin

B. Undangan:
Menteri BUMN dengan jajarannya

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (ARIA BIMA / F-PDIP):

Yang hadir virtual, Pak Demer yang masih ada di Bali.

**Yang saya hormati kawan-kawan Anggota Komisi VI DPR RI, dan
Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Saudara Menteri
BUMN Pak Erick Thohir,**

**Selamat datang kami ucapkan yang terhormat Wakil Menteri BUMN Pak
Pahala Mansury,**

**Yang terhormat Wakil Menteri BUMN Bapak Kartika Wirjoatmodjo, dan
Yang terhormat Sekretaris Menteri BUMN dan para Deputi Kementerian
BUMN Pak Susyanto, serta
Yang terhormat teman kita saudara Arya Sinulingga, Staf Khusus 3
Menteri BUMN,**

Kok saya belum lihat ya mana tuh di *virtual*-nya.

STAF KHUSUS 3 MENTERI BUMN (ARYA SINULINGGA):

Ada ada, ada.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Wamen dua setengah.

KETUA RAPAT:

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI

DPRRI dengan Menteri BUMN Republik Indonesia pada hari ini, dalam keadaan sehat walafiat di tengah adanya wabah pandemi Covid-19.

Semoga kita selalu waspada dan dapat terhindar dari wabah virus tersebut, dan tak lupa selalu untuk menjaga kesehatan serta kebersihan. Dan tentunya kita doakan, dan selalu kita jaga saudara-saudara kita, keluarga kita, lingkungan kita, yang saat ini kita secara bersama-sama prihatin dan kita sangat berharap pandemi Covid ini segera berakhir termasuk memaksimalkan kerja kita antara mitra kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI.

Dalam rangka menekan penyebaran pandemi Covid-19 dan sesuai dengan pemberlakuan PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Juli tahun 2021 di Jawa dan Bali, maka rapat-rapat yang dilakukan di Alat Kelengkapan Dewan dan mitra kerja pemerintah dalam hal ini adalah hari ini dengan Menteri BUMN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, tentang kehadiran fisik rapat-rapat komisi badan paling banyak 20%, selama 3 hari terakhir ini baru hari ini ini yang terbanyak karena ada Rapat Pimpinan Poksi.

Kehadiran fisik juga dari mitra kerja ada batasan 20%, kemudian tata cara rapat Komisi VI DPRRI yang merupakan turunan dari tata cara rapat dari Pimpinan DPR kita laksanakan secara *virtual*.

Kemudian pelaksanaan rapat Komisi dilakukan dengan *live streaming* oleh TV Parlemen, media cetak dan media elektronik, mendapatkan sumber berita dari TV Parlemen.

Juga ketentuan hal yang menyangkut kehadiran anggota yang biasanya menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat, karena kondisi saat ini dilakukan secara zoom dilakukan secara elektronik maka kehadiran anggota tercatat di dalam *list* partisipasi.

Yang rapat hari ini tercatat secara fisik dan lewat partisipasi di dalam zoom tercatat 35.

Pada saat rapat berlangsung *mute* kita atur dari sekretariat, rapat maksimal 2 jam, kalau kita perpanjang hanya tambah 30 menit.

Hal-hal yang terkait dengan peserta rapat nanti akan beri kesempatan untuk bertanya, namun untuk kali ini hanya kepada Ketua Poksi ataupun anggota yang ditugaskan menjadi juru bicara di setiap fraksi.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat rapat kerja hari ini kita lakukan secara *virtual* dan kesimpulan rapat kerja hari ini untuk Komisi VI DPRRI dengan Menteri BUMN DPRRI juga akan kita putuskan beberapa hal. Namun, sebelum itu karena kehadiran sudah 35 orang dari 54 anggota dan diikuti 9 fraksi, maka sesuai ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPRRI tentang Tata Tertib maka rapat kerja hari ini saya buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.56 WIB)

Mengenai selesainya rapat maksimal kita akan selesaikan pukul 6, tapi saya kira pukul 5 kita sudah bisa mengakhiri.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian hal yang terkait dengan agenda rapat hari ini dalam kaitan untuk mengambil keputusan terhadap usulan penerimaan Penyertaan Modal Negara tahun 2022, dan juga terkait dengan usulan tambahan. Terkait dengan usulan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun 2021 dan juga usulan mengenai Penyertaan Modal Negara nontunai yang berupa konversi RDI dan SLI dan S-BPPN.

Bapak Ibu dan hadirin sekalian,

Rapat Kerja hari ini juga merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN perihal pembahasan tambahan Penyertaan Modal Negara anggaran tahun 2021 dan serta Penyertaan Modal Negara Tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada 8 Juli 2021. Komisi VI DPRRI telah menyelenggarakan serangkaian Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa BUMN yang diusulkan penerima tambahan PNM Tahun 2021 serta penerima PMN tahun 2022, baik PMN tunai maupun nontunai yang berupa konversi RDI dan SLI dan S-BPPN.

Beberapa Rapat Dengar Pendapat yang telah kami selenggarakan sebagai berikut:

1. Rapat Dengar Pendapat tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.00 WIB dengan PT Utama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Rapat Dengar Pendapat tanggal 12 Juli 2021 pukul 14.00 WIB dengan PT BTN (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Perum Perumnas.
3. Rapat Dengar Pendapat tanggal 13 Juli pukul 10.00 WIB dengan PT Survei Udara Penas, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Hotel Indonesia Natour, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC, PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, PT Sarinah, PT Garuda Indonesia.
4. Rapat Dengar Pendapat tanggal 13 Juli 2021, pukul 14.00 WIB dengan PT BNI (Persero), PT PLN (Persero), PT Damri, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Pertani, PT Perikanan Nusantara, PT Garam (Persero), PT Perdagangan Indonesia (Persero), dan PT Sang Hyang seri (Persero).
5. Rapat Dengar Pendapat tanggal 14 Juli 2021 pukul 10.00 WIB dengan PT LEN Industri, PT PAL Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia (Persero).

Dalam rapat-rapat tersebut di atas, Komisi VI DPRRI telah mendengarkan secara langsung dari jajaran Direksi BUMN penerima tambahan PMN tahun 2021, dan penerima PMN Tahun 2022 yang diusulkan

oleh Kementerian BUMN terkait dengan beberapa aspek korporasi atas pemberian PMN tersebut meliputi tujuan penggunaan.

Kita cermati betul tujuan penggunaan lebih-lebih karena banyak yang saat ini proses dasar tujuan penggunaannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena *restrukturisasi*, karena *holdingisasi* yang diajukan oleh Kementerian BUMN.

Selain tujuan penggunaan kita cermati betul *timeline*-nya ya juga sasarannya yang ingin dicapai, serta beberapa aspek teknis lainnya. Atas beberapa informasi yang diterima Komisi VI DPRRI telah menindaklanjuti dengan mengadakan rapat internal pada tanggal 14 Juli yang membahas Penyertaan Modal Negara tersebut di mana setiap fraksi telah memberikan pandangan masing-masing terhadap rencana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN.

Kita saling membagi berbagai pengalaman karena Penerimaan Modal Negara berikut juga konversi mengenai SLI bukan hal yang baru, tapi karena berbagai proses perubahan restrukturisasi juga business plan juga target pasar dan pengembangan yang lebih ekspansif karena adanya berbagai perubahan dari Kementerian BUMN rapat-rapat menjadikan pengkayaan wawasan kita Anggota Komisi VI untuk mencermati penting tidaknya PMN, dan efektif tidaknya PMN, serta dampak tidak hanya benefit korporasi tapi juga benefit rasio untuk kepentingan masyarakat atau terkait dengan fungsi BUMN sebagai agent development. Karena itu pada Rapat Kerja kali ini Komisi VI DPRRI akan mengambil keputusan terkait dengan tambahan Penyertaan Modal Negara tahun 2021 serta Penyertaan Modal Negara Tahun 2022 baik tunai maupun nontunai.

Selanjutnya sebelum mengambil keputusan dilaksanakan kami juga masih ingin mempersilakan kepada Menteri BUMN untuk menyampaikan pandangan, penjelasan, dan pandangan akhir atas tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun 2021 serta Penyertaan Modal Negara Tahun 2022 seperti yang sudah disampaikan pada tanggal 8 Juli kepada kami dan dari rapat itu pun juga banyak pendalaman-pendalaman masukan dari kawan-kawan Anggota Komisi VI. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN kalau masih ada hal-hal yang terkait perlu disampaikan, perlu dijelaskan sebagai tambahan masukan tambahan usulan kepada kami Komisi VI, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN.

MENTERI BUMN:

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pimpinan Komisi VI yang hadir hari ini dan tentu para anggota wakil rakyat Komisi VI yang juga turut berpartisipasi hari ini baik secara langsung ataupun secara *virtual*. Dan tentu sebuah apresiasi yang luar biasa ketika kemarin Pimpinan Komisi VI dengan dukungan para Anggota Dewan mendukung bagaimana kita memastikan BUMN juga peduli kepada situasi yang saat ini tentu menjadi prihatin dalam penanganan Covid-19 yaitu mendukung mulai digerakannya truk-truk yang kita lakukan untuk *support* kepada oksigen yang tentu pada saat ini tentu banyak kekurangan di sana-sini dan juga dorongan daripada seluruh Komisi VI yang meminta kami BUMN juga terus membuka Rumah Sakit Modular baik yang ada di Jakarta saat ini ataupun di tempat lain.

Sebagai laporan awal untuk Rumah Sakit Modular yang diminta oleh Komisi VI untuk dijadikan sesegera mungkin di Jakarta Insya Allah kami bekerja keras dan mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini para Pimpinan ataupun wakil rakyat Komisi VI bisa juga menghadiri dan mengecek langsung apakah kesediaannya yang sudah kita lakukan bisa sesuai dengan arahnya. Dan tentu kami juga mengajak Komisi VI juga melihat bagaimana sekarang beberapa perusahaan daripada BUMN juga melakukan bantuan daripada oksigen seperti yang kemarin yang ada di Krakatau Steel dan ini semua berkat dukungan dari Komisi VI.

Adapun dengan PMN yang sudah juga mendapat dukungan tentu kita tekankan sekali lagi bahwa PMN ini adalah mayoritas penugasan yang memang sudah dilakukan sebelum kami semua ada di sini. Tetapi, kami harus menyelesaikan sesuai dengan amanah dari arti penugasan ini. Dan tentu kita ingin menjadi bagian yang peduli bagaimana infrastruktur ini bisa berjalan dengan baik dan tentu menjadi fondasi daripada pembangunan ekonomi kita ke depan.

Adapun seperti paparan bahwa untuk di tahun 2021 yang sudah pernah disampaikan sebelumnya bahwa kebutuhan PMN tambahan adalah Rp33,9 triliun yaitu untuk Waskita tujuh koma sembilan, Kereta Api Rp7 triliun, dan HK Rp19 triliun. Semuanya untuk Kereta Api dan HK ini adalah penugasan penyelesaian. Adapun untuk PMN 2022 yaitu Rp72,44 triliun disini yang sudah disampaikan sebelumnya untuk Hutama Karya sama juga untuk jalan tol tiga puluh satu koma tiga lima puluh.

Lalu untuk *holding* daripada pariwisata yang semuanya terdiri dari banyak anak perusahaan itu Rp9,3 triliun. Lalu PLN Rp8,2 triliun untuk program listrik masuk desa. Lalu BNI Rp7 triliun. Kereta Api Rp4,1 triliun, salah satunya untuk menyelesaikan juga yang namanya Kereta Api Cepat. Lalu Waskita Rp3 triliun. IFG atau itu untuk restrukturisasi daripada Jiwasraya. Adhi Rp2 triliun. Lalu Perumnas untuk memastikan persediaan rumah yang pro rakyat, Bank BTN, RNI, Damri semuanya total Rp7,449 triliun.

Adapun catatan yang memang kami bisa lampirkan bahwa PMN 2022 akan disuntik ke BUMN pada tahun 2022 sehingga PP PMN 2023 terbit

setelah PP *holding* BUMN terbit yaitu untuk khususnya beberapa *holding*. Tentu target dari pada terbit para *holding* ini seperti *holding* pariwisata itu adalah di bulan Agustus 2021, untuk pertahanan September 2021, dan pangan itu untuk September 2021 sehingga PP PMN 2022 terbit di tahun 2022 ini, sehingga secara legalitas pemberian PMN 2022 tidak akan mendapat isu hukum yang akan terjadi sebagai landasannya.

Lalu juga pada saat ini permohonan persetujuan konversi RDI/SLA (PMN nontunai) yaitu menyetujui bila memungkinkan konversi RDI/SLA dan eks BPPN menjadi PMN nontunai dalam bentuk equity sebesar Rp2,6 triliun untuk klaster pangan dan Rp809 triliun untuk klaster industri pertahanan, Rp809 miliar mohon maaf.

Mungkin di slide berikutnya Pimpinan, ini *detail*-nya. Jadi, kalau Pimpinan melihat dan para Anggota Dewan ini semua hal-hal yang sudah terjadi jauh sebelumnya sehingga kita ingin juga menjadi bagian bersama-sama seperti yang disampaikan Pimpinan Komisi VI dan para Anggota Komisi VI wakil rakyat yang saya hormati, dalam arti penyelesaian ini justru di masa kita bekerja saat ini kita menjadi bagian adalah solusi daripada tanggung jawab yang kita bisa diselesaikan bersama-sama.

Dengan segala hormat Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati. Kami sekali lagi mohon dukungan dan tentu kami apresiasi dengan dorong-dorongan yang ada di Komisi VI apalagi pada saat ini dalam penanggulangan masalah Covid-19.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada Pak Menteri BUMN yang telah menyampaikan penjelasan. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan kapoksi dan juru bicara dari anggota yang mewakili untuk memberikan pandangan-pandangan dan tanggapan, tapi karena tadi tanggapan-tanggapan itu sudah kita rangkum bersama-sama apakah dimungkinkan saya akan mengambil satu kesimpulan lebih dulu baru kemudian catatan-catatannya nanti diberikan kepada Pak Menteri.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Boleh usul nggak Mas Bimo?

Sebelum ini usulkan, sebelum mas memunculkan draft kesimpulan kita kasih kapoksi aja 1, 2 menit baru langsung Mas Bimo, ini usulan saya.

KETUA RAPAT:

1 menit, 1 menit?

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Setuju, setuju kapoksi.

KETUA RAPAT:

Setuju ya, kita langsung ke kapoksi masing-masing. Kami persilakan kepada Kapoksi PDI Perjuangan.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ingat waktunya paling maksimal 2 menit-2 menit mas.

KETUA RAPAT:

Mas Anam, Pak dr. Anam kami persilakan Pak dokter.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM):

Iya, siap. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore Pak Menteri dan sahabat-sahabat semua,
Pak Ketua terima kasih kesempatannya,

Pertama, tentu kami sangat mengapresiasi terima kasih banyak kepada Pak Menteri Erick Thohir yang kami lihat terus berjibaku di tengah situasi pandemi yang kita tidak tahu kapan ini berakhir, luar biasa masih terus untuk bagaimana memulihkan situasi kita untuk keluar dari pandemi Covid-19 ini. Kalau Pak ada jabatan di antara presiden dan wakil presiden yaitu setengah presiden yaitu yang pantas menjabat itu ya Pak Erick Thohir begitu.

KETUA RAPAT:

Mantap.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Mantap mas eko.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Ada apa ini, ada apa ini.

F-PG (NUSRON WAHID):

Sabar, masih 3 tahun.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM):

Tapi, dalam situasi kayak begini memang nggak ada kata lain untuk bagaimana kita memberikan semangat kepada mereka yang kita hari ini hanya bisa berbicara, bisa menonton, tapi saya yakin kalau kita di posisi Pak Erick Thohir kita tidak akan mampu melakukan itu begitu.

Nah, soal PMN, HKP berharap kami Fraksi PDI Perjuangan sangat setuju atas hal ini tapi sekali lagi kami berharap untuk bagaimana PMN ini, harapan kami dari rakyat kembali ke rakyat. Bagaimana yang sudah digulirkan ini ke depan benar-benar membawa manfaat untuk rakyat Pak, misalnya untuk sektor infrastruktur dari karya-karya untuk bagaimana hutang-hutang terhadap vendor-vendor yang itu kebanyakan pengusaha-pengusaha muda di daerah Pak untuk diselesaikan agar mereka usahanya bisa tetap berjalan, bisa bayar hutang-hutang ke tukang-tukang ke apa orang-orang di sekitarnya untuk bagaimana ekonomi di daerah bisa bergerak begitu.

Yang kedua harapan kami juga Pak, PMN perlu juga di apa namanya dialokasikan untuk sektor farmasi Pak dan kesehatan. Nah, harapan kami agar bagaimana situasi pandemi ini yang *njenengan* sudah sangat luar biasa ini untuk bisa lebih optimal lagi. Salah satunya apa Pak, misalnya PMN untuk *bed* Pak untuk peningkatan jumlah *bed*, misalnya Pak Erick Thohir bikin pernyataan apa Kementerian BUMN akan menggunakan PMN untuk membeli dan memfasilitasi secara seluruh infrastrukturnya bagi 100.000 *bed* di seluruh Indonesia misalnya itu akan sangat-sangat membantu di tengah situasi ini Pak.

Kemudian yang kedua jumlah ICU Pak, hari ini jumlah ICU di banyak daerah sangat-sangat terbatas sekali. Harapan kami juga ke depan dari PMN ini ada beberapa yang bisa dialokasikan setelah disetujui oleh Menteri Keuangan nanti untuk bagaimana bisa apa pengadaan ICU-ICU yang di mana di daerah-daerah banyak ada keterbatasan atas hal itu.

Tapi sekali lagi Pak kami dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan banyak terima kasih kepada *panjenengan* dan seluruh kawan-kawan Kementerian BUMN yang sudah berjibaku yang kami lihat Pak Menteri BUMN ini tugasnya bukan hanya jadi Menteri BUMN kami lihat merangkap jadi Mensos, merangkap jadi Menteri Kesehatan, merangkap dari segala menteri yang ada di republik ini. Harapan kami Bapak terus menjaga kesehatan karena tenaga *panjenengan* dan pikiran *panjenengan* diharapkan oleh kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merdeka.

KETUA RAPAT:

Merdeka.

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya juru bicara dari Fraksi Partai Golkar Pak Nusron Wahid.

F-PG (NUSRON WAHID):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang pertama untuk PMN tahun 2021 sebesar Rp33 triliun kami menerima dengan catatan sebagian dialokasikan untuk BUMN farmasi dan Pertamina Pertamina IHC, dalam rangka untuk percepatan penanganan obat kelangkaan obat-obatan, vitamin, kekurangan *bed* di dalam rumah sakit dan ICU. Nah, ini poin yang pertama.

Poin yang kedua untuk PMN tahun 2022 untuk yang pengembangan bisnis yaitu BNI dan BTN kami mendukung.

Dan saya kemarin mengkritisi masalah ini tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari direksinya justru ini konsep PMN yang paling benar karena PMN-nya tidak digunakan untuk belanja, tapi untuk penguatan struktur modal dalam rangka mempertahankan jumlah kepemilikan saham pemerintah tetap 60% dan peningkatan CAR sehingga fungsi intermediasi banknya itu tetap meningkat dan meluas.

Khusus untuk PU PMN yang bersifat penugasan selebihnya ada catatan yaitu mempertanyakan tentang penugasan dalam konteks Damri karena di dalam proposal yang disusun oleh Damri hanya untuk pengadaan dan peremajaan daripada angkutan di kota-kota besar yang itu sebetulnya *conflicting* dan *crowding out* dengan Organda karena itu kita meminta penugasannya di daerah-daerah perbatasan di mana yang transportasinya belum masif dan belum kuat swastanya supaya tidak *crowding out* dengan industri transportasi di sektor swasta yang dikoordinir oleh Organda.

Selebihnya untuk penugasan yang lain yaitu masalah restrukturisasi Penas, kami mempertanyakan dari 9,3 T itu masih ada 7 T yang dipertanyakan dalam konteks penugasan. Yang 5 T adalah rencana aksi korporasi, akuisisi saham Citilink, yang nomor 2 adalah, 5 T. Yang nomor dua adalah untuk bantalan solvabilitas dan struktur permodalan daripada Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II yang tergerus akibat adanya Covid. Ini minta pendalaman lagi untuk 2 poin itu.

Kemudian poin yang ketiga adalah poin yang PMN *noncash* konversi RDI, SLA, dan eks BPPN. Karena ini adalah beban pada masa lampau kami mendukung dan meminta kepada Meneg BUMN, Pak Menteri kalau bisa tidak hanya di dua rumpun industri yaitu industri pertahanan dan industri pangan, tapi di semua BUMN termasuk rumpun perkebunan, rumpun kehutanan di mana beban-beban RDI, SLI, dan eks BPPN-nya juga numpuk.

Khusus mengenai Len karena tadi dipertanyakan tentang *legal standing holding*-nya yang masih dalam proses PMN ini dapat dilaksanakan manakala kepada Len konversi itu manakala PP dan proses *holding*-nya sudah tuntas secara hukum, manakala belum selesai sementara proses PMN-nya sudah berjalan maka PMN-nya tidak kepada Len tapi kepada masing-masing BUMN sebelumnya yaitu adalah PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Demikian dari Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Gerindra.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Baik, terima kasih mas Bimo.

**Pak Menteri yang saya hormati,
Seluruh Anggota DPR Komisi VI,**

Tanggapan Fraksi Partai Gerindra adalah yang pertama mengenai Penyertaan Modal Negara tambahan tahun 2021 kami dapat menyetujui karena dan agar roda ekonomi bangsa bisa bergerak di tengah wabah pandemi ini. Tapi kami ada dua catatan Pak Menteri. Pertama hal ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dan dilaporkan secara berkala di Komisi VI.

Catatan kedua adalah kami ingin PMN tambahan 2021 ini juga dialokasikan untuk IHC Pertamedika ya dalam rangka sekali lagi Pak Menteri dalam rangka menambah kapasitas rumah sakit, kamar untuk rakyat, dan juga ICU Pak Menteri. Begitu banyak orang yang meninggal dunia, rakyat Indonesia yang meninggal dunia saat ini, hampir tiap hari orang meregang nyawa Pak Menteri karena tidak dapat rumah sakit ya, tidak mendapatkan ICU ya, tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan obat yang layak.

Inilah legacy kita Pak Menteri inilah kesempatan kita sebagai Anggota DPRRI Komisi VI dan juga Menteri BUMN Penyertaan Modal Negara tambahan 2021 ini kami minta Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Menteri BUMN untuk memberikan tambahan kepada IHC Pertamedika agar bisa membangun Rumah Sakit Modular 3 itu bukan hanya 500 kamar, tapi 2000 kamar dengan 1000 ICU. Dan saya ingin sampaikan juga ke Pak Menteri hari Jumat depan jam 10.00 WIB Satgas Lawan Covid DPRRI akan mengunjungi Rumah Sakit Modular 3 di samping Taman Anggrek itu.

Lalu yang kedua memberikan tambahan PMN kepada BUMN Farmasi agar persediaan obat-obatan dan vitamin untuk rakyat itu tersedia, bukan

hanya tersedia tapi juga mudah didapatkan dan dengan harga murah. Sekali lagi Pak Menteri inilah permintaan dan jawaban Fraksi Partai Gerindra untuk selalu hadir bersama rakyat dan selalu mendukung dan menyerap aspirasi rakyat. Itu syaratnya untuk Penyertaan Modal Negara tambahan tahun 2021.

Untuk PMN 2022 kami menyetujui untuk menjadi usulan dalam RAPBN 2022, mengenai pembahasan dan pendalaman tentu akan kita bahas di masa sidang setelah nota keuangan disampaikan oleh Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus 2022 nanti. Meskipun kita selama satu minggu ini dipimpin oleh Mas Bimo dan Pak Martin Manurung ya kita sudah rapat 2 minggu ini, tapi tentu hal ini akan kita alami lagi dan kita setuju untuk dibahas dalam RAPBN 2022.

Yang ketiga Pak Menteri, kita mengapresiasi gerak cepat Pak Menteri melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke Krakatau Steel kita dan ke Priuk. Dan harapan kami sebagai Anggota DPRRI yang mengawasi dan mendukung serta menjadi mitra Pak Menteri kita berharap Pak Menteri melibatkan Anggota Komisi VI dalam kunjungan-kunjungan kerja yang pro rakyat seperti itu, jangan hanya Pimpinan Komisi saja yang diajak tapi Anggota DPRRI Komisi VI juga diajak juga sehingga semua bisa terlibat dan mendukung kegiatan-kegiatan pro rakyat.

Terima kasih Pimpinan, terima kasih Pak Menteri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat berjuang Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinannya aja belum diajak, anggotanya minta. Silakan selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Partai Nasdem.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Nyat Kadir.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Nanti Pak Ketua Pak Martin Manurung yang akan menambah. Kalau saya hanya, pertama pada prinsipnya Partai Nasdem mendukung, memahami dan mendukung penambahan PMN 2021 dan 2022 yang tidak dapat terelakkan itu karena penugasan ya dan restrukturisasi, kemudian

pengembangan usaha. Dengan catatan yang sama dengan teman-teman tadi, saya singkat aja.

Pada saat ini PMN ini sangat disorot keras oleh banyak pihak, pengamat atau masyarakat seakan-akan pemerintah dan kita-kita semualah tidak peka terhadap kondisi yang gawat sekarang ini dan lebih mengutamakan infrastruktur. Mungkin pikirannya kita juga mengertilah ya pikiran kita tak sama pandangan beda-beda, tapi sekali lagi kita memahami ini penugasan dan ini untuk masa depan.

Kita sudah siap-siap untuk pemulihan ekonomi dan setara dengan negara-negara maju diutamakan infrastruktur untuk mendukung ekonomi. Tetapi yang penambahan itu sama dengan teman tadi supaya menghibur hati masyarakat dan kita juga dianggap peka terhadap situasi yang genting ini saya Pak malah ada kata-kata kami mendesak ya, bukan lagi meminta mendesak supaya anggaran PMN tambahan PMN 2021 itu dialokasikan untuk yang tadi disampaikan teman-teman, untuk dalam rangka BUMN Farmasi memproduksi obat-obatan lebih banyak ya sehingga tidak ada istilahnya persediaan menipis ya, langka ya.

Padahal ini bukan hanya tugas kita, swasta juga ada yang mau produksi obat-obat, tapi kita lebih terdepan lah dan juga di rumah sakit seperti yang teman-teman tadi sampaikan ya Rumah Sakit Modular dan lain sebagainya baik kapasitasnya, *bed*-nya dan lain-lain sebagainya lah tak perlu saya ulang lagi.

Yang kurang-kurang nanti ditambah oleh Pak Ketua kami, Pak Martin. Saya kira demikian Pak Menteri, saya apresiasi dan mengapresiasi Pak Menteri sudah berjibaku luar biasa ya. Malah ini bukan hanya setengah presiden, kalau kami mengatakan Bapak ini tiga perempat presiden.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Demikian dari Fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Tommy Kurniawan.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Terima kasih Pimpinan yang kami banggakan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Ketua dan Pimpinan, serta rekan-rekan Anggota Komisi VI yang kami banggakan,
Bapak Menteri, Bapak Wamen, dan jajaran Kementerian BUMN yang menjadi harapan kebanggaan kita ke depan dan seluruhnya yang hadir,**

Kami dari Fraksi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa Penentu Pemimpin Bangsa ke depan otomatis dengan alasan PMN ini menjadi catatan kita bahwa memang menjadi rencana strategis nasional dan juga tidak lepas dari proyeksi dividen pemasukan negara baik dari hal penugasan, konstruksi, dan lain-lainnya yang tidak lepas pada saat ini adalah penyelamatan bangsa terhadap pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, penambahan Penyertaan Modal Negara ini Pak Menteri kami harapkan bisa meningkatkan produktivitas, baik penambahan di APBN 2021 dari total itu yang kita harapkan juga harus diproyeksikan tidak lepas dari penanggulangan Covid-19 dari penyediaan kesehatan baik farmasi dan lain-lain yang memang kami sadari itu tidak mudah. Negara butuh biaya yang besar dan butuh kesadaran yang cukup besar dalam permasalahan ini, seberapa pun yang kita lakukan apalagi dalam kondisi keuangan bangsa kita yang seperti ini tidak mudah dalam menyelesaikan segala masalah musibah ini dengan tanpa kita bersama-sama tabayun, ikhtiar, kesadaran yang tinggi, itu kami akui Pak Menteri yang sudah luar biasa dilakukan dan kami berharap itu sangat bermanfaat.

Untuk penambahan PMN di 2022, kami juga dari Fraksi PKB menyetujui otomatis menjadi tantangan yang luar biasa untuk bagaimana nanti pertanggungjawaban dari kementerian dari semua hal yang sudah mendapatkan PMN di tahun 2022 ini yang selanjutnya bisa kita bahas kembali secara detail untuk mekanisme dengan ketentuan yang berlaku, itu yang kami harapkan.

Saya kira untuk Fraksi PKB tidak panjang lebar, saya kira cukup.

*Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Terima kasih Mas Bimo.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang hadir,**

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,**

Saat ini kita menyadari betul bahwa pandemi Covid-19 sudah memukul telak seluruh sektor pembangunan ekonomi Indonesia khususnya perusahaan-perusahaan BUMN yang menjadi lokomotif pertumbuhan, perekonomian bangsa. Sudah hampir 2 tahun, seluruh perusahaan BUMN harus merasakan kesulitan untuk tetap produktif dalam melakukan tugas dan fungsi operasional.

Sehingga sampai saat ini banyak perusahaan BUMN di Indonesia yang merugi atau bahkan terancam bangkrut sampai harus melakukan ragam aksi korporasi yang tentu saja tidak selalu memberikan ruang keuntungan bagi perusahaan. Hal tersebut akhirnya cukup menjadi landasan mengapa pemerintah perlu untuk memberikan suntikan berupa PMN entah dalam bentuk tunai maupun nontunai bagi perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

Dari klaster Pariwisata, Pertahanan, Pangan, Farmasi, Logistik, Perbankan dan lain sebagainya. Namun kondisi pandemi Covid-19 yang tidak juga membaik telah memaksa negara untuk terus melakukan berbagai kebijakan yang *extraordinary* yang *extraordinary* untuk menangani pandemi Covid-19 seperti misalnya, melakukan percepatan vaksinasi, memberlakukan pembatasan kegiatan, hingga memperlebar ruang defisit, dan menekan APBN dari tahun anggaran 2020 sampai saat ini.

Seperti yang kita ketahui bahwa, Kementerian BUMN mengajukan anggaran PMN 2021 dan 2022 yang terdiri dari:

1. Anggaran tambahan PMN 2021 dalam bentuk tunai sebesar Rp33,9 triliun untuk PT Waskita Karya, Hutama karya, dan PT KAI;
2. Anggaran untuk PMN 2022 dalam bentuk tunai sebesar Rp72,449 triliun untuk PT Hutama Karya, PT Aviasi Pariwisata Indonesia, PLN, BNI, PT KAI untuk kereta cepat, Waskita Karya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Adhi Karya, Perum Perumnas, PT BTN, RNI dan Perum Damri; serta tentu
3. PMN nontunai tahun 2022 yang berasal dari konversi RDI, SLA menjadi PMN untuk BUMN Pangan dan BUMN Industri Pertahanan.

Pada dasarnya kami mendukung adanya pemberian PMN yang diberikan untuk berbagai perusahaan BUMN tersebut yang tentu memerlukannya. Namun, dalam proses ini perlu diperhatikan beberapa catatan penting yang menjadi catatan kami sebagai berikut:

1. Pemberian PMN kepada perusahaan-perusahaan BUMN ini harus terukur dan tepat sasaran.
Pemerintah harus membuat prioritas di mana saat ini pemerintah harus mendahulukan pemulihan dan percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, perusahaan BUMN yang akan menerima PMN harus perusahaan yang memprioritaskan upaya pemulihan dampak destruktif dari pandemi Covid-19.

PMN harus benar-benar dipertimbangkan secara matang jangan sampai BUMN menjadi beban APBN dikala pandemi seperti ini. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan APBN, jangan sampai akibat dari PMN utang BUMN dan Indonesia menjadi lebih tinggi.

2. Pemanfaatan nilai dari PMN ini juga perlu terasa langsung bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memiliki dampak langsung terhadap rakyat dalam hal ini terutama sektor UMKM, pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja lokal, pemberdayaan petani, nelayan, dan petambak, serta sektor-sektor lainnya yang langsung berpengaruh pada kualitas hidup rakyat kecil di Indonesia.
3. Perusahaan penerima PMN ini harus mampu memastikan bahwa PMN yang diterima akan memberikan keuntungan bagi korporasi dan *multiplayer effect* yang konstruktif terhadap sektor lainnya yang menjadi variabel dari pertumbuhan ekonomi nasional, dari sektor hulu ke hilir sehingga *divergensi* pertumbuhan ekonomi cukup lebar dan kontraksi pertumbuhan ekonomi di Q1-2021 dapat membaik di kuartal berikutnya.
4. PMN harus digunakan secara produktif sehingga harus memperhatikan aspek keterpaduan, keberlanjutan, dan inklusivitas, serta dapat memberikan benefit *corporation* sehingga perusahaan-perusahaan BUMN penerima PMN, dapat menampilkan performa yang baik dengan memberikan kontribusi yang besar dalam bentuk dividen yang memadai dan berdampak langsung nantinya terhadap pemasukan dan peningkatan pajak untuk negara.

Pada akhirnya kami Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan-catatan tersebut di atas dengan pemberian PMN bagi beberapa perusahaan BUMN di Indonesia. Upaya efisiensi dan restrukturisasi BUMN sebisa mungkin meliputi aspek manajemen serta *operation cost* agar pengembangan serta investasi korporasi dan prinsip *good corporate governance* bisa tercapai.

Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Walaupun realitasnya kabar duka datang setiap hari, masyarakat masih sulit mendapatkan pekerjaan, *income* tidak pasti. Namun, kita semua harus tetap berdoa, ikhtiar, dan optimis bahwa pandemi Covid-19 segera berakhir.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak SBY yang menyatakan bahwa saat ini kita semua perlu melakukan manajemen krisis yang cepat, tepat, efektif, efisien, terukur, sehingga manfaatnya dapat langsung menyentuh rakyat Indonesia dengan optimal. BUMN tidak boleh bekerja sekedar *business as usual*, harapan kami di tangan Pak Erick mudah-mudahan BUMN ke depan bisa lebih maju, lebih mewarnai, dan menjadi lokomotif pembangunan nasional. Terima kasih atas kinerja yang sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN. Harapan rakyat perjuangan Demokrat, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapoksi VI Fraksi Partai Demokrat DPRRI, Herman Khaeron ditambahkan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Herman Khaeron dari juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Iya, Pimpinan. Rencananya Pak Rafli yang masuk, apa kita tunggu Pak Rafli masuk Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Kalau begitu apa saya lewati ...

... (*rekaman tidak jelas*) ...

...dulu dari Partai Amanat Nasional atau Bu Nevi?

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Iya Pak, kita terakhir aja PKS.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara Partai Amanat Nasional, kami persilakan. Pak Eko atau Pak Hakim, kami persilakan. Pak Abdul Hakim.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Pak Andre udah ketutupan belum, udah aman ya. Kok miring sih kameranya.

Terima kasih Pimpinan.

Mas kok miring sih mas kameranya mas.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Biasanya lurus, tapi waktu Pak Hakim yang bicara agak miring Pak ini. Bukan salah Pak Hakim karena di belakangnya ada Andre Rosiade itu.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Iya ada gangguannya di belakang ini.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang hadir secara fisik maupun secara *virtual*,

Yang saya hormati Bapak Erick Thohir Menteri BUMN dan beserta seluruh jajaran, Pak Wamen I, Wamen II, dan Pak Stafsus,

Banyak sekali apresiasi yang diberikan kepada Pak Menteri Pak Erick Thohir gimana dalam penanganan Covid ini merangkap yang tadi dibilang

merangkap sebagai Menteri Kesehatan, kemudian Menteri BUMN, Menteri Infrastruktur dan lain sebagainya. Mungkin saya ingin memberikan sedikit semangat Pak, jadi semakin cepat pemulihan krisis kesehatan ini yang dilakukan Bapak itu berarti semakin cepat pula Pak Liga di Indonesia ini bisa bergulir. Jadi, baik klub yang dimiliki oleh Bapak dan klub yang saya miliki juga bisa segera berlaga dan insya Allah nanti para suporter pasti akan memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri.

Kemudian terkait agenda rapat pada sore hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal Pak Menteri. Jadi, memang dalam suatu sektor swasta ini sulit untuk bergerak secara optimal bahkan sebagian di antaranya harus berhenti bergerak dan akhirnya banyak yang merumahkan karyawannya. Memang salah satu harapan untuk memulihkan atau menggerakkan perekonomian bangsa ini adalah melalui BUMN dan pernah saya sampaikan di rapat paripurna itu harapannya BUMN itu menjadi motor penggerak nasional di tengah kondisi yang serba tidak pasti ini.

Nah, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi APBN sekarang yang begitu berat perhatian negara terhadap BUMN dalam bentuk penambahan penyertaan modal negara harus sangat selektif dan rasional, maksud kami selektif dan rasional ini mengacu pada pertimbangan skala prioritas, kemudian indikator kinerja BUMN serta dampaknya terhadap kebijakan menyelesaikan pandemi serta pemulihan ekonomi nasional kita sama-sama tahu kondisinya sedang berat Pak Menteri.

Nah, pandangan kami tentang penyertaan modal negara kepada beberapa BUMN akan kami sampaikan dari yang usulan tambahan di tahun 2021 sebesar Rp33,9 triliun dengan rincian tujuan berdasarkan penggunaannya penugasan sebesar 76,69% dan restrukturisasi sebesar 23,31%, itu yang pertama. Nah, dengan melalui pertimbangan yang holistik, rasional, dan selektif kami dari Fraksi PAN secara prinsip menyetujui usulan tambahan PMN tahun 2021 sebesar Rp33,9 triliun, untuk detail rincian alokasinya kepada BUMN mana saja kami serahkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Kami berhadapan Kementerian BUMN dapat membuat keputusan alokasi yang selektif dan rasional seperti yang telah yang telah disampaikan oleh beberapa teman-teman kami sebelumnya jadi prioritas-prioritasnya diatur lebih baik Pak Menteri untuk yang tahun 2021.

Kemudian dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 untuk tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan modal negara sebesar Rp72,449 triliun dengan rincian penggunaan penugasan 80,7%, pengembangan 12,42%, dan juga restrukturisasi sebesar 6,9%. Untuk usulan PMN pada RAPBN 2022 sebesar Rp72,449 triliun pada dasarnya kami dari Fraksi PAN menyetujui usulan tersebut dengan memberikan catatan agar alokasi Rp72,449 triliun itu diberikan atau dialokasikan kepada BUMN-BUMN strategis yang memang membutuhkan anggaran ini berdasarkan skala prioritas yang ada. Jadi, kiranya mana-mana yang tidak perlu dan bisa di-*pending* di tahun-tahun berikutnya itu di-*pending* terlebih dahulu Pak Menteri.

Pandangan lebih detail terkait BUMN mana saja yang menurut kami bernilai strategis dan layak untuk mendapatkan PMN di tahun 2022 akan kami sampaikan dalam pembahasan setelah penyampaian nota keuangan pemerintah bulan Agustus yang akan datang dan juga terkait yang penyertaan modal negara tersebut.

Harapan kami Pak Menteri dengan penambahan PMN ini kepada BUMN pemerintah dapat terus menjalankan kinerja terbaiknya, mendorong BUMN menjadi lokomotif penggerak ekonomi nasional dan kontribusi yang diberikan BUMN kepada pemerintah baik dalam bentuk dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak, Insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir dapat meningkat secara pesat. Mungkin itu dari kami Fraksi PAN Pak Menteri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kami persilakan selanjutnya dari PPP.

F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Pak Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir secara virtual yang belakangan sangat sibuk sekali karena memang tugasnya cukup banyak gitu kan dan mudah-mudahan Pak Menteri tetap diberi kesehatan dan tetap bisa berkomunikasi lancar dengan khususnya Anggota Komisi VI karena kan karena kesibukannya Pak Menteri seringkali agak susah komunikasi dengan beliau ini,

Terkait dengan apa pengalokasian untuk PMN 2021 sebenarnya kami itu menjadi pendapat kami itu merupakan kewenangan dari kementerian untuk dari pemerintah untuk mengalokasikan ke mana saja, tetapi paling tidak ada beberapa hal yang kita tekankan supaya di PMN yang 2021 penambahannya itu juga dikaitkan dengan penanganan Covid-19.

Terutama tadi sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu terkait dengan persoalan kesehatan yang dihadapi Indonesia saat ini mulai dari kelangkaan obat, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, dan juga kelangkaan oksigen, maka kami harapkan nanti kehadiran BUMN, di tengah negara yang situasi sulit seperti ini BUMN hadir memberikan solusi. Maka dari itu terhadap PMN yang 2021 kami sepenuhnya menyerahkannya kepada pemerintah dengan penekanan yang tadi kami sampaikan.

Selanjutnya, terkait dengan usulan Penerimaan Modal Negara tahun 2022 yang oleh Kementerian BUMN didistribusikan kepada 12 BUMN secara umum sudah disampaikan kemarin ketika RDP dengan teman-teman BUMN paling tidak secara umum kami bisa masih bisa memahami tinggal nanti kelanjutannya akan dialami setelah Undang-Undang APBN disahkan khususnya nanti dialami di Komisi VI.

Memang jika mempertimbangkan kebutuhan korporasi, pemberian PMN kepada 12 BUMN tersebut dapat dimengerti dan dipahami. Namun demikian, pertimbangan etis dan keadilan juga harus dikedepankan untuk mempertimbangkan dan memutuskan pemberian PMN kepada 12 BUMN tersebut, terlebih lagi pada situasi sekarang ini di mana beban anggaran negara yang sudah semakin berat, dan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat semakin sulit dan mengancam tingkat kesejahteraannya.

Oleh karena itu pemberian PMN tidak boleh menjadi penyebab hilangnya hak masyarakat dalam menerima pelayanan negara untuk mengatasi dampak Covid-19, serta mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk lebih detailnya nanti kami akan lanjutkan dalam pendalaman, mudah-mudahan Komisi VI pada tahun ini tetap bisa ikut terlibat dalam pendalaman ketika nanti Undang-Undang BUMN sudah diputuskan.

Terima kasih kepada Pimpinan kami sengaja singkat saja karena kita sudah seharian rapat di ruangan ini, walaupun apa, diusut ini bisa dikategorikan melanggar nanti ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Partai Keadilan, Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Iya, Pimpinan, saya saja karena Pak Rafli sinyalnya susah. Terima kasih Pimpinan atas waktunya. Iya, dengan saya Ibu Nevi.

KETUA RAPAT:

Masih *show* nyanyi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Gimana Pak, dengan suaranya.

KETUA RAPAT:

Mungkin masih show Pak Rafli.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Dia di Aceh Pak, sinyalnya nggak bagus Pak. Dengar Pak suaranya Pak Menteri, Pak Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Dengar Bu, kami persilakan.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Iya, dengar ya.

Terima kasih Pimpinan atas waktu yang diberikan, dan Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati, dan Menteri BUMN yang kami banggakan bersama jajarannya,

Alhamdulillah dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita masih menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan ini memang berat di masa pandemi tapi kita juga harus bergerak karena negara juga harus hidup di tengah-tengah masyarakat yang sedang kesusahan.

Dan tentu tak lupa kita panjatkan salam dan shalawat kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasalam, keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti.

Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin dan Menteri BUMN yang kami hormati,

Untuk PMN yang 2022 kalau kita rinci ialah, pertama penugasan sekitar 80% untuk HK, Perumnas, KAI, PT Aviassi Pariwisata Indonesia, lalu Adhi Karya, PLN, RNI, Damri. Lalu yang kedua pengembangan 12,42% untuk BNI dan BTN. Yang ketiga adalah restrukturisasi 6,9% untuk BPUI, Jiwaskaya dan Waskita. Untuk PMN tahun 2022 kami dari Fraksi PKS lebih fokus kepada untuk penanganan Covid karena kita tengah fokus pada penanganan Covid yaitu khususnya membantu rakyat yang tengah kesulitan baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi.

PMN yang diambil dari tahun 2022 adalah PMN yang terkait langsung ya dengan layanan publik ya dan masyarakat langsung menikmatinya. Jadi, karena kita tengah fokus pada penanganan Covid tentu PMN tahun 2022 itu adalah PMN yang melayani publik, itu yang akan kita dukung.

Lalu untuk PMN tahun 2021 ini mungkin kami berbeda dari fraksi lain bahwa anggaran yang dipakai ialah dari sisa APBN kalau tidak salah tahun 2021. Kami dari PKS berpandangan bahwa dana cadangan PEN dan SAL harusnya digunakan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya pada perekonomian khususnya bagi masyarakat menengah bawah dan UMKM bukan untuk tambahan PMN BUMN ya.

Untuk itu kami sebetulnya dari Fraksi PKS menolak ya untuk PEN cadangan PEN dan SAL untuk PMN BUMN yang seharusnya memberikan dividen sebagai PNBPN justru saat ini malah menjadi beban keuangan negara padahal sejak sumber pendanaannya adalah dari pajak rakyat dan utang. Covid-19 belum bisa dipastikan kapan bisa selesai dan ditangani dengan baik oleh pemerintah, ketidakpastian ekonomi Indonesia juga bertambah dengan adanya gelombang kedua maka saat ini Indonesia tertinggi di dunia karena seharusnya pemerintah menggunakan SAL dan apa tadi dan cadangan PEN untuk penanganan Covid dan cadangan PEN untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat, menghidupkan dan menyelamatkan UMKM, dan sektor produktif yang memiliki *multiplier effect* untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam jangka pendek atau instan bukan untuk tambahan PMN ya. BUMN juga mau ada PMN maka harusnya di RAPBN 2022.

Itu kami berbeda Pak Pimpinan, Pak Menteri dari Fraksi PKS. Itu saja, terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian hal yang terkait dengan pandangan fraksi. Selanjutnya dari meja Pimpinan, silakan Pak Martin.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Boleh nambah nggak anggota, Bapak Pimpinan? Bapak Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Singkat, substansial, 1 menit Bu Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

1 menit baru mangap juga udah 1 menit.

KETUA RAPAT:

Iya, 1 menit.

ANGGOTA:

Saya 1 menit juga.

KETUA RAPAT:

Nah, karena ini akan banyak sekali kalau saya buka.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak menteri yang saya hormati,

100% saya mendukung PMN yang diusulkan yang bersifat penugasan, kepentingan rakyat banyak, dan juga untuk menjalankan proyek-proyek prioritas nasional. Ada hal yang ingin saya tanyakan Pak Menteri ini menyangkut daripada legalitas, apakah PMN ini bisa disalurkan melalui PT perusahaan holding yang secara hukum itu belum belum apa namanya sah Pak Menteri.

Contohnya saja Aviasi dan Pariwisata Pak Menteri, itu kan masih proses holdingisasinya saja itu masih proses sampai tahun 2023 ya kan Garuda baru 23, ada yang tahun 2022. Nah, ini kan belum terbentuk holdingisasinya bagaimana PMN itu bisa disalurkan kepada holding Pak Menteri. Itu menjadi apa pertanyaan saya karena ketika saya baca Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 itu jelas disebutkan tata cara Penyertaan Modal Negara yang diberikan kepada BUMN, di situ jelas kepada Perseroan Terbatas BUMN tidak ada membicarakan holding saat ini Pak Menteri.

Jadi, saya dukung, tapi apakah tidak sebaiknya sebelum proses holdingisasi ini lengkap dan tuntas secara hukum PMN ini diberikan kepada BUMN-BUMN terkait langsung Pak Menteri. Jadi, tidak dulu tidak melewati apa namanya holding.

KETUA RAPAT:

Saya kira cukup.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Dan yang terakhir satu lagi. Pak Menteri mohon maaf kemarin kami ini Komisi VI belum jelas mengenai rencana daripada BUMN Aviasi dan Pariwisata ini tentang pembelian saham Citilink dan Gapura oleh PT Penas. Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Selanjutnya Pak Martin.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Catatan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Pak?

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Boleh kasih catatan Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Dengan Pak siapa ini?

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Sonny Mas.

KETUA RAPAT:

Ini kan sudah per Fraksi gitu kan.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Tapi kata Pimpinan tadi fraksi menyampaikan sikap, Anggota boleh kasih catatan.

KETUA RAPAT:

Ya, tapi tidak boleh bertentangan dengan sikap fraksi.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Tidak Pimpinan. Boleh Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Silakan 1 menit.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Baik, Terima kasih Pimpinan beserta segenap anggota yang terhormat.

**Yang saya hormati Pak Menteri, dan
Yang saya banggakan Wamen I, II, dan yang hadir,**

Pertama saya memang menggunakan arahan Pimpinan tadi akan memberikan catatan. Yang kedua saya ingin menyampaikan arahan dari Ketua DPRRI Mbak Puan ketika waktu rapat paripurna dulu ketika menerima BPK menyampaikan laporannya kita diminta untuk menjadikan itu sebagai referensi.

Pertama, meskipun saya optimis bahwa negara ini tidak mungkin gagal dalam menghadapi pandemi ini tentu saya prihatin dengan apa yang terjadi sekarang ini. Jadi, kalau tadi semua teman menyampaikan Pak Erick sudah cukup luar biasa karena memang Perpres Nomor 82 Tahun 2020, Pak Erick sebagai Menteri BUMN telah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana dari Komite Penanganan Covid dan apa dan PEN, sehingga apa yang dilakukan menurut saya cukup maksimal tapi tentu ada beberapa catatan misalkan tadi sudah saya sampaikan soal kelangkaan obat dan sebagainya.

Satu contoh saja misalkan paracetamol itu di dapil saya di Banyuwangi itu hilang di apotek, sementara pemerintah menyarankan rumah sakit menyarankan semuanya orang harus isoman di rumah, lah obatnya dari mana? Ini saya kira harus menjadi perhatian Ketua.

Yang kedua adalah berdasarkan laporan dari BPK sebagaimana sudah saya sebutkan ada 2170 temuan, dari 2170 temuan itu di antaranya 1241 itu berkaitan dengan ketidakefektifan dan ketidakhematan termasuk yang lain terkait dengan tidak sesuai dengan regulasi. Sedangkan khusus yang menyangkut dengan BUMN pada kisaran semester pertama itu ada potensi kerugian 1,7 triliun 1,07 triliun dan kekurangan penerimaan pada 1,12 triliun. Saya kira ke depan ini harus menjadi perhatian kita bersama termasuk yang pada semester kedua bahkan potensi kerugiannya adalah 257 triliun. Pertanyaan ini sekaligus saya.

KETUA RAPAT:

Ya Pak, nanti konteksnya lebih pendalaman setelah saya ketuk saja. Ini lebih masalah PMN dulu Pak.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Atau nanti ada waktunya Pak?

KETUA RAPAT:

Iya nanti saya kasih Pak. Penyertaan Modal Negara dulu Pak supaya nggak konteksnya dan kontennya supaya tidak lepas.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Iya, sebetulnya ini sesuai dengan konteksnya. Tapi kalau nanti memang diberi waktu saya akan sampaikan, gimana Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Cukup dulu Pak.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Jadi nanti ada ya setelah diketuk ya?

KETUA RAPAT:

Iya, nanti saya beri waktu. Kami persilakan Pak Martin.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Baik, Terima kasih mas Bimo.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI, juga
Yang saya hormati Pak Menteri,**

Saya singkat langsung poin per poin untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Kapoksi Nasdem Pak Nyat Kadir.

Pertama terkait dengan penambahan untuk tahun 2021 penambahan PMN dari PEN untuk 2021 kami setuju, dengan catatan bahwa penggunaan tersebut:

1. Tidak untuk tambal sulam menutup kerugian yang diakibatkan oleh *missmanagement* ya.
Jadi, kalau bersifat penugasan dan lain sebagainya kami paham setuju, tapi kalau untuk menutup lubang dari *missmanagement* saya rasa ini tidak bisa kita terima atau pahami.
2. Kami juga meminta seperti dari fraksi lain agar sebagian dari penambahan PMN 2021 ini, dialokasikan atau digunakan untuk mendukung BUMN rumah sakit dan BUMN farmasi dalam rangka penambahan ketersediaan tempat tidur, ICU, obat-obatan dan vitamin dalam menghadapi darurat Covid-19 saat ini.

Jadi, itu dua hal terkait dengan penambahan tahun 2021.

Yang kedua untuk PMN 2022 kami mengerti bahwa secara *general* ini kami setuju, untuk bisa diusulkan masuk dalam APBN 2022 yang nota keuangannya akan dibacakan sebentar lagi oleh Presiden.

Namun demikian, terkait alokasinya untuk bisa dibahas kembali dalam masa sidang berikutnya karena, satu, masih dirasa dari RDP yang sudah kami lakukan dalam seminggu ini:

1. Masih perlu pendalaman aturan atau regulasi terkait status BUMN yang 100% milik negara, dan yang ada saham publiknya.
Nah, ini harus kita cek lagi agar kita tidak menyalahi aturan yang terkait dengan hal ini;

2. Kita perlu juga mendalami aturan atau regulasi terkait dengan proses *holdingisasi* agar penyaluran atau persetujuan PMN ini dapat seiring dengan *progres legal standing holdingisasi*-nya. Tadi Pak Menteri juga sudah mengatakan hal ini jadi itu kami sambut baik; dan
3. Terkait PMN 2022, setelah kami dalam yang terkait dengan PMN kepada Penas ada keterkaitan dengan Garuda. Nah, keterkaitan dengan Garuda ini perlu ya kita bahas secara tersendiri karena ini terkait dengan gambaran utuh penyelamatan Garuda. Jadi, tidak kita lihat secara sepotong-sepotong melainkan dalam satu sistem atau mekanisme di mana kita memang menyelamatkan Garuda. Ada proses restrukturisasi perusahaan, renegosiasi, renegosiasi dengan *lessor*, dan posisi utang Garuda terhadap pihak ketiga termasuk BUMN-BUMN yang lain. Jadi, agar tidak kita bahas secara sepotong-sepotong karena kami lihat bahwa ini dalam rangka juga keterkaitannya dengan penyelamatan Garuda.

Saya pikir itu Mas Bimo catatan dari kami melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Kapoksi Nasdem Bapak Nyat Kadir. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada kawan-kawan Anggota Komisi VI yang telah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pendalaman dalam kaitan rencana tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun 2021 dan rencana Penyertaan Modal Negara Tahun 2022. Untuk itu, kami persilakan Pak Menteri beberapa hal yang memang perlu diberi respon, kami persilakan.

MENTERI BUMN:

Terima kasih Bapak Pimpinan rapat dan para Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Tentu terima kasih tadi atas saran dan tentu catatannya bahwa, satu, mengenai PMN 2021 ini mayoritas mendukung tetapi tentu ada catatan bila dimungkinkan juga bagaimana keberpihakan daripada PMN ini juga bisa dialokasikan untuk tentu situasi yang sangat mendesak pada saat ini apakah itu untuk pertambahan tempat tidur, ICU, atau dukungan kepada obat-obatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat saat ini.

Tentu catatan lainnya ingin dipastikan juga bahwa PMN ini harus dilandasi oleh *good corporate governance* dan transparansi sehingga tidak adanya tambal sulam atau tadi penugasan-penugasan yang malah diputarbalikkan untuk kepentingan daripada individu di masing-masing perusahaan, tetapi bagaimana harus malah menyelesaikan daripada penugasan yang sudah sesuai dengan target dan tentu landasan daripada acuan yang kita sepakati bersama-sama.

Untuk dari pada review daripada PMN 2021 harus dilaporkan secara berkala saya rasa ini menjadi bagian yang didukung oleh kami dari Kementerian BUMN karena tentu dalam mengawasi banyaknya BUMN sendiri itulah penting kenapa daripada kerja sama yang baik dengan tupoksi kami yaitu Komisi VI pada saat ini dan saling mengawasi itu ada hal yang positif yang terus kita lakukan agar tentu BUMN bisa berjalan dengan baik dan akhirnya juga memberikan kontribusi yang baik secara korporasi maupun secara tadi *public service obligation* yang diharapkan oleh para Komisi VI.

Tentu untuk 2002 sendiri kami sepakat bahwa PMN akan dilakukan pendalaman sesudah tentu serah terima daripada Pimpinan negara kepada DPR ataupun persetujuannya. Dan di situ sendiri sebagai catatan yang saya rasa penting sekali bahwa tadi khususnya untuk daripada PMN untuk beberapa holding yang tadi saya sudah sampaikan bahwa:

Satu, untuk holding pariwisata sendiri baru akan terbentuk pada bulan Agustus, Pertahanan itu September 2021, tadi Agustus 2021 dan September 2021 untuk holding Pangan dan Pertahanan. Dan tentu di situ sebagai catatan secara legalitas pemberian PMN 2022 tidak ada secara isu hukumnya karena pasti kita menunggu PP holding yang terbit di tahun 2021. Jadi, kita tidak akan menyalahi daripada prosesnya.

PMN 2022 tidak akan mendahului PP Holding. Jadi, pendalaman yang barusan diutarakan oleh para Pimpinan dan Anggota tentu untuk masing-masing perusahaan apakah yang dinamakan tadi holding Penas atau holding daripada Pertahanan dan Pangan kita masih punya waktu untuk pendalaman yang memang sesuatu yang kita harus jaga daripada kepercayaan PMN pada saat ini apalagi di isu pada saat Covid-19 yang sangat sensitif ini.

Catatan lainnya tentu kami sesuai dengan RDP yang terakhir sebagai garis yang kita sepakati bahwa kami dari Kementerian BUMN sendiri tidak ingin mengambil tadi tupoksi daripada kementerian lain dalam penanganan Covid, tetapi kami pada saat ini justru membantu ya sesuai dengan penugasan dan juga dorongan daripada Komisi VI bahwa kita harus terlibat langsung tetapi bukan mengambil alih.

Tentu sebagai catatan juga tentu ketika kami ditugaskan sebagai bantu daripada KPCPEN tidak lain justru karena fungsi kami yang tidak kalah pentingnya di *public service* yaitu dengan infrastruktur dan tentu keupayaan yang kita miliki di Kementerian BUMN, apakah yaitu kami pada awalnya tidak pernah memperhitungkan, contoh yang didukung oleh Komisi VI ketika kita menggabungkan rumah sakit-rumah sakit yang di mana awalnya rumah sakit ini terpisah pisah ya tidak di-*manage* dengan *expert*-nya yang terbukti hari ini karena dukungan Komisi VI Rumah Sakit BUMN ini menjadi skala yang luar biasa.

Bahkan terima kasih dari dukungan Komisi VI juga dukungan dari banyak pihak kami mendapatkan penghargaan IHC menjadi salah satu rumah sakit yang terbaik dalam menangani Covid. Hal-hal ini tentu hal upaya yang kita lakukan bersama-sama.

Untuk pengadaan obat, kami juga melakukan seperti disampaikan sudah beberapa kali, kita terus memproduksi obat sesuai dengan bentuk tupoksi kami apakah itu *papiravir*, *oseltamivir*, *zithromax azithromycin* ataupun lain-lainnya ya yang saat ini juga ditambah lagi *paracetamol* ya kita lakukan.

Tetapi, sebagai catatan tentu kami melakukan tadi sesuai dengan penugasan apakah kita *drop* di Kementerian Kesehatan ataupun jalur-jalur yang sesuai perintah dari pada penugasan tersebut. Nah, karena itu kemarin juga kami menambahkan bahwa kenapa jalur-jalur distribusi ini kita minta dukungan menjadi akses kepada publik yang selama ini tentu hanya di-*drop* ke satu titik, tetapi juga kita bisa menjadi akses publik.

Karena itu, kemarin ketika Kementerian Kesehatan *me-launching* daripada *website*-nya kita bisa lihat di situ masih mendapat dukungan yang maksimal daripada apotek-apotek yang ada di bawah Kementerian BUMN ada itu Kimia Farma dan lainnya, ini sebagai bukti kami mendukung, tidak mengambil alih daripada tupoksi kementerian lain dan sehingga dengan segala kerendahan hati kita tetap minta tadi dukungan dari Komisi VI ataupun koreksi yang lainnya.

Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan, mohon maaf kalau ada yang terlewat. Tentu sebagai catatan kami untuk kita bisa mendalami paparan yang lebih dalam untuk di kemudian hari.

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri BUMN yang telah memberikan tanggapan atas pandangan dari masing-masing Fraksi terkait dengan pengambilan keputusan terhadap usulan penerima Penyertaan Modal Negara Tahun 2002 dan usulan untuk konversi utang RDI/SLA dan eks BPPN menjadi Penyertaan Modal Negara Tahun 2022.

Kalau memang sudah tidak ada hal yang lagi, nanti yang lain kita bicarakan setelah kesimpulan. Saatnya kami bacakan draft kesimpulan rapat kerja virtual pada hari ini. Kami persilakan sekretariat untuk menampilkan draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri BUMN, Pengambilan Keputusan terhadap Usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun 2021 dan Penyertaan Modal Negara Tahun 2022 pada BUMN, Rabu 14 Juli 2021.

1. Komisi VI DPRRI dapat menyetujui usulan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Covid-19 dan untuk menggerakkan perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19 dengan catatan dilakukan secara transparan, akuntabel, serta dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPRRI.

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VI DPRRI mendesak Kementerian BUMN Republik Indonesia mengalokasikan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 bagi BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, serta vitamin dan obat-obatan pada masa pandemi Covid-19 ini.

Ini merupakan satu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Izin Ketua. Sepertinya bagi itu diganti kepada deh, bagi itu harusnya diganti kepada BUMN Farmasi, bukan bagi.

ANGGOTA KOMISI VI:

Siap, setuju.

KETUA RAPAT:

Ini tumben Pak Bu Evita, biasanya Pak Toha.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Mewakili Pak Toha.

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Bagi-bagi Bu, bagi-bagi. Bagi-bagi Bu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Apanya yang dibagi?

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Oleh-oleh dari Gili Trawangan.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Pak Menteri? Bisa memberikan kekuatan politik juga untuk membicarakan dengan Ibu Menteri Keuangan.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Pak Menteri?

KETUA RAPAT:

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

MENTERI BUMN:

Belum dibuka, maaf. Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju.

3. Komisi VI DPRRI menyetujui Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2022 dan usulan konversi RDI/SLA dan eks BPPN menjadi Penyertaan Modal Negara Nontunai Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022. Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Masa Sidang setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Rapat Paripurna.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Setuju Mas Bimo, tapi ini usulannya nggak usah dua kali kan.

KETUA RAPAT:

Ya ini gimana?

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Menyetujui Penyertaan Modal Negara dan konversi menjadi usulan kan, iya kan?

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Menjadi usulan, ya ya.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Ya itu lebih bagus.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Saya bingung kenapa yang itu.

KETUA RAPAT:

Dan konversi ya.

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Itu dan-nya menjadi berulang-ulang tuh.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Dan-nya juga dua kali. Tahun Anggaran 2022 serta konversi RDI/SLA dan eks BPPN.

F-PG (NUSRON WAHID):

Cara mengakomodir berbagai catatannya kawan-kawan tadi, misal soal isu Penas.

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Iya, itu soal yang Rp5 triliun ke Citilink itu kan yang kita masih, masih mendalami itu.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kan dibikin saya usulin itu. Kan pembahasan pendalaman setelah Nota Keuangan Presiden kan kita bahas lagi.

F-PG (NUSRON WAHID):

Nah, usulannya itu kalau bisa jangan masuk usulan.

KETUA RAPAT:

Ya begini, ini kesimpulan dulu. Dan hal-hal yang menyangkut catatan-catatan penting dari kawan-kawan tadi, nanti rapat juga masih kita lakukan terus-menerus untuk hal yang menyangkut sebelum dan setelah nota keuangan.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Iya, setuju karena toh kita tidak memberi persetujuan.

KETUA RAPAT:

Tapi paling penting tadi yang Pak Menteri sudah setuju adalah bagaimana dukungan politik Komisi VI atas hal-hal yang menyangkut suasana kebatinan rapat untuk hal yang terkait mendesak kepada BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC untuk mendapatkan alokasi tambahan. Kita ingin sekali BUMN ini situasinya ada yang sudah menganggap darurat ya kita akan konsisten antara Kementerian BUMN dan Komisi VI untuk menjadikan BUMN ini harus terdepan dalam menanggulangi masalah Covid-19 ini.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Pak Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar Bu, sebentar Bu.

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Kalau yang nomor 2 saya kira ini it's ok. Nomor 3 ini yang harus.

KETUA RAPAT:

Dan kita harapkan dari hal-hal yang belum terakomodir di dalam di dalam kesimpulan ini yang menyangkut apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dalam pendalaman-pendalaman kemarin akan kita jadikan di dalam pendalaman evaluasi maupun laporan-laporan yang secara berkala di Komisi VI ini seperti yang sudah kita tulis di dalam substansi kesimpulan ini.

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Jadi nomor 3 ini Ketua, menyetujui dengan catatan.

KETUA RAPAT:

Ada hal-hal yang terkait substansi kesimpulan komisi, silakan.

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Menyetujui dengan catatan.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Kita bukan tidak menyetujui. Izin Ketua.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Catatan tidak boleh bertentangan sikap fraksi, ingat dulu ini garis bawahnya, sikap fraksi bagaimana.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Iya, nomor 3 Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini hanya masalah leksikal kok, masalah kalimat.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Pak Ketua, nomor 3.

KETUA RAPAT:

Tiga.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Ini kalau Pak Ketua mengatakan kita akan mendalami, di sini sebelum kita melakukan melakukan pendalaman ini kita sudah menyatakan persetujuan loh dari poin 3 ini. Bagaimana kita menyetujui sesuatu yang kita belum jelas? Komisi VI DPRRI menyetujui Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2022.

KETUA RAPAT:

Memang gelondongan kita setuju Bu.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Menjadi usulan Mbak.

KETUA RAPAT:

Menjadi usulan, kalau ndak setuju nanti RAPBN keluar gimana nota keuangan?

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Jadi menjadi usulan, usulannya nggak ada di sini. Menjadi Penyertaan Modal Negara.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Itu Mbak, baca dulu mbak makanya dibaca dulu lengkap.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ya udah baca ulang, dibaca ulang dulu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Usulannya di atas.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Dalam RAPBN.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Bimo, dibaca ulang dulu Pak Bimo.

KETUA RAPAT:

Di-*bold* saja, ditebalkan.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Jadi, Pak Menteri nanti udah bisa mengusulkan secara gelondongan dalam RAPBN, alokasinya pembahasan pembahasannya kita akan lakukan pada masa sidang berikutnya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Gini, gini, gini, gini. Gelondongan Rp72 triliun itu kita setuju menjadi usulan Meneg BUMN dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2022 yang akan dibacakan Bapak Presiden pada tanggal 14 Agustus, 16 Agustus. Nah, apakah nanti printilannya 72 itu ke mana ke mana ke mana itu nanti kita putuskan lagi setelah nota keuangan itu kita bahas lagi.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Itu baru saya setuju, berarti gelondongan.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Kan memang iya ditulis gelondongan Mbak.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Mana gelondongannya mana?

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Ya itu total, itu kan nggak ada rinciannya Mbak. Berarti gelondongan.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Mana?

ANGGOTA:

Maksudnya Bu Evita ditulis gelondongan gitu loh.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Masa iya menyetujui secara gelondongan.

KETUA RAPAT:

Kalau di dalam RAPBN gelondongan.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Ya kan dicari dicari kalimatnya dong, dicari kalimatnya gitu loh.

F-PG (NUSRON WAHID):

Bu Evita butuh gelondongan.

ANGGOTA:

Kita belum ada senso soalnya ini masih gelondongan ini.

KETUA RAPAT:

Bu, saya kira ini kalau.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Sudah cukup ini Mas kesimpulannya Mas.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Atau dibuat, atau dibuat. Komisi VI DPRRI menyetujui Penyertaan Modal Negara Tunai sebesar, berarti tidak ini. Kalau kita mengatakan menyetujui 22 ini berarti kita menyetujui ditulis sebesar berarti kita hanya gelondongan yang kita setuju.

F-PG (NUSRON WAHID):

Ya tulis sebesar berapa angka tulis sebesar, tulis. Ya sudah tulis sama nontunai sebesar berapa tulis.

KETUA RAPAT:

Ya karena APBN nggak ada.

F-PG (NUSRON WAHID):

Nggak apa-apa, tinggal nanti rinciannya bahas lebih lanjut. Saya juga ada catatan sama. Saya sehati dengan tante Evita cuma beda dengan aspek gelondongan itu.

KETUA RAPAT:

Sebesar Rp72,449 triliun Tahun Anggaran 2022.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Bu Evita udah lama nggak liat gelondongan.

KETUA RAPAT:

Sudah, sudah ya?

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Konversinya berapa?

F-PKB (FAISOL RIZA, S.S.):

Bu Evita, tolong makanannya disingkirkan biar energinya berkurang.

KETUA RAPAT:

Nontunainya.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Kok dihapus yang 72.

KETUA RAPAT:

Serta konversi RDI/SLA sebesar.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Nggak, sebesarnya mestinya setelah tahun 2022 itu, bukan di situ.

KETUA RAPAT:

Dan eks BPPN.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Sebesarnya setelah tahun 2022, sebesarnya setelah tahun 2022 itu.

KETUA RAPAT:

Berapa?

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Sekretariat, sebesarnya itu bukan setelah BPPN sebesar ini, tapi sebesarnya di bawah.

KETUA RAPAT:

Satu-satu dulu. Sebesar.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Sebesarnya tidak di situ Ketua, harusnya di bawah setelah tahun 2022.

KETUA RAPAT:

Sudah, yang SLA ini.

WAMEN BUMN:

3,4 Pak Ketua.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Pak Menteri RDI/SLA-nya itu berapa ya daripada dicari-cari.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Disebut sama Pak Pahala tuh Rp3,4 triliun.

WAMEN BUMN:

Rp3,4 triliun Pak Ketua.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Pak Pahala bisa ini bantu.

KETUA RAPAT:

Rp3,4 triliun ya.

WAMEN BUMN:

Rp3,4 Triliun betul itu Pak.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Berapa?

WAMEN BUMN:

Rp3,4 triliun betul itu Pak.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Rp3,4 Triliun.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Nah ini udah benar.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ya udah ketuk kalau benar.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Yang disetujui itu apa, Penyertaan Modalnya atau usulan Penyertaan Modal?

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Usulan.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Nah, makanya menyetujui usulan Penyertaan Modal.

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Nah cocok, cocok Pak Toha, setuju saya.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Jangan Pak, Pak jangan Pak. Kita tidak menyetujui usulan Pak, kita menyetujuinya menjadi usulan dalam nota keuangan. Kalau kita bilang menyetujui usulan berarti kita nggak bahas lagi Pak.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Benar, setuju.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Ini udah benar kalimatnya, menyetujui ini sebesar ini menjadi usulan gitu Pak Toha.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L L.M.):

Setuju dengan Pak Martin saya.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Bukan begitu, bukan begitu Pak Martin.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Ini baru kita setuju menjadi usulan.

ANGGOTA KOMISI VI:

Iya oke, menurut Pak Andre gimana Pak Andre?

KETUA RAPAT:

Sudah cukup. Jadi yang kesimpulan ketiga saya bacakan.

3. Komisi VI DPRRI menyetujui Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun serta konversi RDI/SLA dan eks BPPN sebesar Rp3,4 triliun menjadi Penyertaan Modal Negara Nontunai Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022. Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Masa Sidang setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Rapat Paripurna.

Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Yang tambahan PMN nggak disebut angkanya sekalian Mas biar sama? Poin nomor.

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Udah itu.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Oh belum diketuk lagi. Udah, udah diketuk yang poin 1.

KETUA RAPAT:

Angkanya sudah ditambahkan itu.

1. Komisi VI DPRRI dapat menyetujui usulan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp33,9 triliun untuk penanganan Covid-19 dan untuk menggerakkan perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19 dengan catatan dilakukan secara transparan, akuntabel serta dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPRRI.

Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan,

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri BUMN Republik Indonesia beserta jajarannya. Dan atas nama Pimpinan Komisi VI kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan Komisi VI sekalian yang terhormat yang dengan sabar dan penuh perhatian telah mengikuti Rapat Kerja virtual pada hari ini. Apakah masih ada lagi?

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Pimpinan.

Satu aja, mungkin dimasukkan dalam kolom catatan semua pendalaman yang terkait akan pembahasan berikutnya masuk dalam catatan.

KETUA RAPAT:

Oh dengan sendirinya Bapak, itu ndak, kalau dimasukkan harus poin per poin.

Saya kira kita akomodir Pak Mukhtarudin bahwa sekretariat mencatat penuh hal-hal yang terkait banyak hal tentang proses daripada pembicaraan yang bermuara pada rapat hari ini yang tidak terpisahkan dari hal-hal yang akan kita bahas setelah persetujuan-persetujuan secara formal di dalam penyampaian Nota Keuangan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2021.

Demikian, rapat kami tutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.30 WIB)

JAKARTA, 14 JULI 2021
a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP.197104071992032001